

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Himpunan Mahasiswa Islam (selanjutnya di singkat HMI) merupakan organisasi kemahasiswaan terbesar di Indonesia yang visi kehadirannya senantiasa berkomitmen terhadap nilai-nilai ke-Islaman (keummatan) dan kebangsaan (ke-Indonesiaan), sebagaimana terpancar pada tujuan awal kelahirannya pada *5 Februari 1947 di Yogyakarta*, yaitu mempertahankan negara Republik Indonesia serta menegakkan dan mengembangkan Syi'ar agama Islam " (Sitompul, 1976a : 20).

Kehadiran organisasi HMI yang tampak pada tujuan di atas memberikan deskripsi situasi dilematis umat Islam di satu sisi dan disisi yang lain adalah masa mempertahankan kemerdekaan bangsa (negara), sehingga menjadi kerangka umum merakit peran, status, fungsi, sifat dan identitas sebagai totalitas yang utuh dalam meringkai keseluruhan tujuan yang dirumuskan. HMI berperan sebagai sumber insani pembangunan bangsa, berstatus sebagai organisasi kemahasiswaan, berfungsi sebagai organisasi kader dan independen sebagai sifat dasarnya serta Islam sebagai identitasnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka HMI mewujudkan tujuannya secara lebih komprehensif sebagaimana dirumuskan dalam pasal 5 Anggaran Dasar HMI

yaitu, " *Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT* " (Anggaran Dasar HMI pasal 5, 1992 : 40)

Menurut Nurcholis Madjid, "HMI berkomitmen kepada ke-Indonesiaan merupakan kelanjutan dari sistem keimanannya, HMI meng-Indonesia karena adanya tujuan luhur yaitu hendak mengejawantahkan nilai luhur yang diserapnya dalam ajaran-ajaran agama. (Sitompul, 1986c : 2- 3).

Menurut Victor Tanja yang melakukan studi khusus mengenai HMI, bahwa Kebangkitan gerakan muslim modern (*pembaharu*) di Indonesia merupakan salah satu dari sekian perkembangan pergumulan politik terpenting yang bakal berlanjut dengan dampak besar atas sejarah politik di Indonesia dan untuk memahami sejarah dan perkembangan ideologi HMI kita harus mengkaji latar belakang pembaharu muslim itu. (Victor Tanja, 1991: 15).

Victor Tanja kemudian menunjuk HMI sebagai organisasi muslim pembaharu yang telah tumbuh terbebas dari kegagalan sebagaimana dialami oleh arus umum kaum pembaharu Islam berkenaan dengan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh situasi pluralistik, sosio-politik dan religius di Indonesia. HMI berbeda dengan golongan muslim lainnya karena mendasarkan posisinya pada ajaran Al Qur'an dan As-sunnah dalam pertimbangan politik untuk menjawab modernisasi, sekularisasi dan hubungan antar agama atas karsa sendiri, HMI telah berusaha menjadikan

Islam sebagai agama yang cocok dengan tuntutan pluralistik kultural rakyat Indonesia.

Dalam konteks ini kita ketahui bahwa respon politik HMI yang paling dikedepankan adalah terhadap ideologi komunis, sekaligus respon politik yang paling banyak menyita perhatian kalangan ilmuwan sejarah maupun politik, mengkajinya dengan penuh gairah, mempelajari sejarah perjuangan HMI yang berkaitan dengan nilai kebangsaan maupun kenegaraan.

Indonesia sebagai negara yang berfalsafah Pancasila dan sila pertama yang mendasari sila-sila selanjutnya, adalah Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa kewajiban setiap warga negara untuk menjaga dan menjamin keberlangsungan hidup bangsa dari ideologi yang tidak bertuhan. Akan tetapi suatu kenyataan telah terjadi dalam sejarah pergumulan politik bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang telah memiliki sistem Ketuhanan justru tidak mentolerir kehadiran paham atheis (Komunis) yang dikembangkan oleh PKI.

Sebagai organisasi Islam, tentu saja HMI secara ideologis dan psikologis tertantang dan ikut bertanggungjawab terhadap keberadaan paham bertuhan itu secara mantap, kemudian diketahui pula bahwa Ideologi Komunis yang bersifat atheis, adalah yang tidak mengenal adanya kehidupan beragama atau ber-Tuhan. Pandangan ini bersifat materialisme dengan sistem totaliter, di mana paham komunis (PKI) meletakkan negara sebagai alat, untuk mewujudkan cita-cita

politiknya dan bila perlu dengan jalan menindas golongan lain terutama golongan agama. Maka sudah pasti kehadirannya di Indonesia menjadi parasit terhadap perkembangan dan pertumbuhan kehidupan keagamaan dan wawasan kebangsaan. HMI sebagai lokomotif suara generasi muda Islam Indonesia mencium gelagat yang tak enak ini, HMI mengambil sikap yang tegas antara lain:

- Berupa aksi -aksi demonstrasi menuntut pembubaran PKI
- Berupa konsep-konsep tuntutan terhadap pembubaran PKI
- Merumuskan Nilai Dasar Perjuangan (NDP) organisasi. (Sitompul, 1995d : 198).

Selanjutnya pertentangan yang paling seru antara HMI dan komunis (PKI) semakin tajam bukan hanya pada ideologi saja tetapi termasuk pertentangan yang bertujuan pada strategi penyelenggaraan negara. Misalnya PKI dan golongan sayap kiri lainnya dengan kuat sekali melancarkan aksi-aksinya terhadap HMI dan mendesak Presiden Soekarno untuk membubarkan HMI sebagai organisasi kontra revolusi yang berbahaya serta berwatak sama seperti Masyumi. Dalam salah satu pidato ketua partai komunis dengan tegas menuntut pembubaran HMI, dan agar pembubaran itu dilaksanakan serentak dengan pembubaran Masyumi.

Sejak saat pemberontakan di Madiun kaum komunis (PKI) memandang HMI sebagai penghalang dengan bobot yang sama dengan Masyumi. Karena itu mereka berhasrat menghancurkan organisasi ini secepat-cepatnya, dengan demikian dapat melaksanakan langkah strategis lebih lanjut menuju cita-cita kekuasaan

komunis. Serangan aksi komunis berupa tuduhan, bahwa HMI seperti Masyumi bertentangan dengan sila-sila Pancasila, terlibat pemberontakan kedaerahan. Bahwa HMI anti Soekarno, anti Nasakom, dan sebagai agen CIA maka HMI berpihak pada Malaysia dalam pertikaianya dengan Indonesia, HMI juga tidak memberi dukungan penuh terhadap gerakan Darul Islam. (Victor Tanja, 1991 : 96).

Dari tujuan awal kelahiran HMI yang telah disebutkan di muka ternyata dapat menaikkan lima aspek dalam konsep pembaharuan lima aspek tersebut itu antara lain aspek politik, pendidikan, ekonomi, budaya dan agama. (Sitompul, 1984b : 77).

Dalam perspektif hukum Islam, "Berpolitik merupakan salah satu bentuk tanggungjawab manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi terutama erat kaitannya dengan apa yang dipahami oleh Mawardi, Ibnu Taimiyah dan Al Maududi, bahwa Sultan atau penguasa merupakan bayangan Tuhan di muka bumi. (Mawardi, 1973 : 5).

Islam adalah agama integralistik yang tak mengenal pemisahan agama di satu sisi dan politik atau negara Islam pada sisi yang lain, melainkan antara agama dan politik menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai suatu yang alami.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 165 yang berbunyi.

وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض
 درجات ليلبواكم في ما انتمكم . الانعام : ١٦٥

Artinya Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di muka bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.

(Dept. agama R.I. Jakarta, 1983).

Menurut ayat tersebut di atas umat manusia berpolitik sesungguhnya dia secara sadar merefleksikan ajaran agamanya yang terkandung dalam ajaran agama yang mengangkat manusia di bumi sebagai upaya menguji bagaimana manusia berbuat.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat diketahui adanya masalah-masalah sebagai berikut

Adanya sikap politik HMI terhadap bahaya laten komunis dalam konstalasi politik di Indonesia. Kemudian tanggapan pemerintah dan organisasi Islam lainnya terhadap sikap politik HMI tersebut serta dalam perspektif hukum Islam terhadap sikap politik HMI dalam konstalasi politik di Indonesia

C. Pembatasan Masalah

Kajian ini berupaya menganalisis sikap politik HMI terhadap bahaya laten komunis (PKI) dari perspektif Fikih Siyasah. Untuk itu lingkup pembahasannya akan berkisar seputar; latar belakang kelahiran dan peran HMI di tengah kondisi politik nasional, sikap politik HMI terhadap bahaya laten komunis (PKI), serta pertimbangan-pertimbangan politik yang dilakukan HMI dalam menghadapi paham komunis jika ditinjau dari perspektif hukum Islam (Fikih Siyasah).

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka studi ini dibuat rumusan masalah ini sebagai berikut

1. Bagaimana sikap politik HMI terhadap bahaya laten komunis dalam konstalasi politik di Indonesia?
2. Bagaimana analisa hukum Islam tentang sikap politik HMI terhadap bahaya laten komunis dalam konstalasi politik Indonesia?

E. Tujuan Studi

Kajian ini bertujuan

1. Untuk mengetahui sikap politik HMI terhadap bahaya laten komunis dalam konstalasi politik di Indoensia.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisa hukum Islam tentang sikap politik HMI terhadap bahaya laten komunis dalam konstalasi politik di Indoensia.

F. Kegunaan Studi

Dari hasil studi dan pembahasan sekurang-kurangnya dapat digunakan dalam dua aspek,

1. Aspek keilmuan (**ilmiah**) memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang fikih siyasah dan sekaligus dapat dijadikan bahan kajian bagi generasi berikutnya.
2. Aspek politik sebagai sumbangan gagasan ke segenap lapisan masyarakat, khususnya pemerintah dan Ormas keagamaan di Indonesia untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan politik internal organisasi maupun pertimbangan politik kenegaraan secara nasional

G. Sumber data dan teknik penggaliannya

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library riset*). Karena itu data dalam penelitian ini berupa bahan-bahan ilmiah yang pada hakekatnya merupakan upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah. Data itu harus relevan dan konsisten dengan rumusan masalah tersebut. Data ilmiah adalah data yang akurat, *reliable*, *valid*, dan mengena (**Biro Penerbitan Fakultas Syari'ah , 1989 : 16**).

Karena jenis penelitiannya berbentuk kepustakaan (library riet), maka sumber datanya berupa bahan pustaka (meliputi pelbagai lembar tertulis, yang berbentuk;

a. Buku-buku, dokumen-dokumen organisasi, majalah, artikel, jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah (baik yang dipublikasikan maupun tidak) yang ada relevansinya dengan topik ke-HMI-an.

b. Buku-buku, majalah, jurnal dan harian yang berkaitan dengan tema; *kepolitikan nasional, Partai Komunis Indonesia dan partai Islam di Indonesia.*

Sedangkan teknik penggalian data menggunakan analisis data historis. Artinya, mengungkap data dengan cara menganalisis latar belakang historis suatu kasus yang dipelajari.

H. Metode analisa data

Dari data pustaka yang terakumulasi dan berhasil digali oleh penulis tersebut selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah :

a. **Editing.** Yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, relevansi dan keseragaman antara satu data dengan lainnya.

b. **Pengorganisasian data.** Yakni menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka penelitian yang sudah dirancangan. Semua

langkah ini dilakukan secara konsisten dan terpadu sehingga masing-masing langkah penelitian itu terpenuhi.

c. Penemuan hasil. Data yang telah disistematisasikan itu dianalisis dengan menggunakan teori, dalil, dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang akurat dan valid. Dari proses ini simpulan yang diperoleh diharapkan merupakan jawaban terhadap persoalan yang dirumuskan dalam rumusan penelitian. Lebih jelasnya, analisis itu, dalam hal ini menyangkut sikap HMI dalam konstalasi politik di Indonesia. Dengan langkah-langkah itu, penulis berupaya menggambarkan sikap politik HMI dalam konstalasi politik di Indonesia.

I. Metode pembahasan hasil data

Ada tiga metode yang digunakan untuk mendekati penelitian ini.

Pertama, metode Induktif. Dalam model metode ini diawali dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal khusus dari data riset. Dari kekhususan-kekhusuan data itu selanjutnya diambil kesimpulan umum. Proses memasukkan dari yang khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum ini dinamakan generalisasi. **Kedua, metode Komparatif.** Yaitu membandingkan antara norma-norma hukum dan kenyataan atau kejadian-kejadian yang ditemukan dalam riset. Dengan membandingkan hal-hal yang ditemukan itu selanjutnya didapatkan kesimpulan yang seimbang. Sedangkan metode ketiga yang digunakan adalah **analogis**, yaitu mengqiyaskan antara dua atau lebih kejadian atau data yang ditemukan, karena kemungkinan terdapat sifat yang sejenis

atau kejadian mirip. Dengan ketiga metode ini kesimpulan hasil riset kepustakaan diharapkan dapat menjawab rumusan-rumusan permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan permasalahan di atas.